



► PROGRAM PEMERINTAH

38% Warga Jogja Terima Bantuan

JOGJA—Sebanyak 53.319 keluarga atau 38,3% dari total jumlah keluarga di Kota Jogja akan menerima bantuan nontunai yang akan diberikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), Pemda DIY dan Pemkot Jogja.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, menjelaskan KK yang akan mendapat bantuan adalah mereka yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dan mereka yang terdampak pandemi Covid-19 di luar kedua data tersebut.

"Bantuan berupa uang tetapi diberikan melalui bank. Skema bantuannya berbeda-beda. Ada yang Rp200.000 per bulan selama sembilan bulan untuk non-PKH dan BPNT, sementara untuk KK penerima PKH dan BPNT bantuan diberikan selama 12 bulan," ujarnya, Selasa (28/4) lalu.

Sementara bantuan dari Kemensos, skemanya diberikan setiap bulan tetapi hanya selama tiga bulan sebesar Rp600.000 kepada 36.000 keluarga. Sedangkan bantuan dari Pemkot Jogja diberikan kepada KK yang terdata dalam KSJPS, DTKS yang belum terkover Kemensos dan yang belum mendapat program apa pun, yang jumlahnya sebanyak 16.719 keluarga.

Untuk kepastian data dan besaran anggaran, kata Heroe, baru dirapatkan dengan Pemda DIY pada Kamis (30/4). "Terutama menyangkut sasaran yang nantinya berimbas pada besaran anggaran yang harus dialokasikan dan kapan mulai diluncurkan," kata dia.

Dalam pendistribusian bantuan tersebut, yang jadi persoalan adalah kesesuaian data. Data DTKS milik Kemensos didasarkan pada NIK ibu atau istri, sedangkan data KSJPS Pemkot menggunakan kepala keluarga, sehingga jika tidak disaring ulang, keluarga sasaran rawan menerima bantuan bertumpuk.

"Beruntung Pemkot sudah hampir tiga tahun menggunakan data tunggal NIK dan Kepala keluarga untuk program bantuan, yang didukung Sistem Informasi Manajemen [SIM] pemberdayaan yang didasarkan pada status kesejahteraan dan NIK. Jadi, data PKH dan BPNT dari Kemensos harus dilacak siapa kepala keluarganya, baru dipisahkan sehingga tidak terjadi duplikasi," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Jogja, Agus Winarto, mengatakan bagi pihak swasta atau organisasi dan personal jika ingin ikut memberi bantuan berupa sembako kepada masyarakat, diarahkan melalui kelurahan. "Agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan orang nunggu bantuan di jalan," katanya.

Di kelurahan, Pemkot telah membentuk Lumbung Pangan. Hal ini tadinya hendak digunakan menampung bantuan dari pemerintah yang berupa sembako. Tetapi karena kebijakan dari Pusat berubah, bantuan dialihkan dalam bentuk uang nonutnai. (Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005